

ANALISIS PERHITUNGAN KINERJA DENGAN MEKANISME IKPA TERHADAP
KEPUASAN DAN KINERJA SATKER PADA KPPN MEULABOH

Oleh

Mirna Wita¹⁾, Rusdi²⁾

^{1,2}Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar Maulaboh

Email: ¹mirnawati16@gmail.com, ²rusdi@utu.ac.id

Abstrak

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan selaku BUN sebagai alat pengukur pelaksana kinerja. Penggunaan IKPA adalah salah satu bentuk pola perubahan pemikiran bahwa kinerja pelaksanaan anggaran bukan hanya dinilai dari penyerapan anggarannya tapi juga mengingat pada saat ini banyak aspek kinerja pelaksanaan anggaran yang tersedia dalam database pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan bahan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perhitungan kinerja dengan mekanisme IKPA terhadap kepuasan dan kinerja satker pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah mewawancarai, deskriptif kualitatif, dan membagikan kuesioner kepada satuan kerja (satker) Meulaboh. Populasi dalam penelitian adalah satuan kerja yang menjalin kerja sama dengan KPPN yaitu sebanyak 4 kabupaten wilayah aceh, diantaranya Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Seumelue. Hasil penelitian ini penulis dapat menguraikan tentang bahwa Satuan Kerja (satker) puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai KPPN Meulaboh.

Kata Kunci: Nilai IKPA, Kinerja, Kepuasan, Satker

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi yang bergerak di bidang keuangan. Beberapa tugas utama KPPN yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK/234/KMK.01/2015 pada Tanggal 21 Desember tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, distribusi, pengawasan, stabilisasi, dan menetapkan persediaan. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan APBN sebaik mungkin agar apapun yang telah menjadi tujuan dari pembangunan dapat dituntaskan dengan terbuka dan jelas sehingga pembangunannya dapat diselesaikan tepat waktu (Danella, 2017).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh adalah kantor yang bergerak dibidang Keuangan dibawah Kuasa

BUN sebagai penyalur dana pusat (kas Negara) ke satuan-satuan kerja yang ada di wilayah meulaboh. KPPN Meulaboh juga melayani pemerintah daerah dalam pelayanan proses Pencairan Dana baik berupa (BLT, Gaji Pegawai, dan Non Gaji), Laporan Posisi Rekening, Konsultasi, Bimtek, dan sebagainya yang berhubungan dengan dan APBN (Danella, 2017).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) adalah kebijakan ekonomi yang dibuat secara menyeluruh oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara, mewujudkan pembangunan, pemerataan, serta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. APBN ini disusun untuk kebutuhan pemerintah negara agar bisa di manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dalam mengambil kebijakan (Annatasya Meisa Putri dan Aldilla Iradianty, 2020).

Dalam rangka menetapkan tugas dan fungsi Monitoring Dan Evaluasi pelaksanaan

anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat Kementerian/Lembaga dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh.

IKPA sebagai alat monev yang digunakan secara luas oleh K/L dan menjadi perhatian utama pimpinan satker/eselon I/K/L sebagai salah satu angka dalam pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran sehingga penilaiannya harus terpercaya, terbuka, dan akuntabel.

Penggunaan IKPA adalah salah satu bentuk pola perubahan pemikiran tentang pelaksanaan kinerja anggaran bukan hanya dinilai dari penyerapan anggarannya tapi juga berpikir pada saat ini banyak pelaksanaan kinerja anggaran banyak memiliki yang tersedia dalam wadah informasi pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan bahan evaluasi. Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan munculnya era reformasi penganggaran melalui pemanfaatan data yang bersumber dari transaksi pengelolaan keuangan oleh K/L dengan tujuan agar meningkatkan kinerja dalam penganggaran untuk implikasi pada perkembangan teknologi informasi saat ini.

Pada praktiknya, saat ini data nilai IKPA telah terintegrasi dan tersedia pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) yang mengolah dan menampilkan data kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satker K/L di Indonesia. Melalui aplikasi ini, seluruh K/L dapat melakukan pemantauan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sampai ke tingkat satker K/L secara periodik, kemudian K/L dapat melakukan perbaikan dan peningkatan untuk capaian kinerja pelaksanaan anggarannya.

Selain itu, amanat Menteri Keuangan agar Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pengawalan pencapaian output belanja, khususnya output strategi K/L melalui aktivitas monitoring dan konfirmasi data capaian output K/L. Capaian output bagi satuan

kerja mempunyai nilai sangat penting karena sebagai alat ukur seberapa jauh anggaran yang disediakan dapat menghasilkan output seperti yang direncanakan/ditargetkan pada awal tahun anggaran. Yang terpenting lagi bahwa capaian output dimaksudkan untuk menghasilkan *outcome* yang manfaatnya ditujukan untuk masyarakat luas.

LANDASAN TEORI

Nilai IKPA

Indikator pelaksanaan anggaran adalah yang telah ditetapkan kemenkeu sebagai alat untuk mengukur kinerja pelaksana anggaran belanja K/L. Nilai IKPA merupakan kesesuaian pada perencanaan dan pelaksana anggaran secara efektifitas, efisiensi dan patuh pada regulasi. Indikator nilai ikpa tahun 2021 terdapat 13 indikator. Nilai IKPA diberlakukan dari DIPA berlaku secara efektif sampai akhir tahun anggaran. Nilai IKPA Satuan Kerja (satker) di berikan pada aplikasi OM-SPAN, perhitungannya di berlakukan secara otomatis pada data dari aplikasi pengelolaan Keuangan satker (Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, 2020)

Kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* (prestasi kerja atau capaian kerja yang sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang (Halim & Andreani, 2017)

Kinerja adalah bentuk akuntabilitas organisasi atas wewenang yang ditujukan kepada instansi tersebut. Pengukuran kinerja dapat juga digunakan untuk mekanisme usulan anggaran yang diajukan. Penyusunan pengukuran kinerja membutuhkan proses yang sangat panjang dari mulai menentukan program hingga menentukan indikator kinerja (Pustakawan & Akbar, 2013).

Kinerja adalah hasil yang telah di capai oleh seseorang dalam pekerjaannya menurut kriteria yang telah di tentukan oleh dalam suatu perusahaan.

Kepuasan Satuan Kerja (satker)

Kepuasan satuan kerja adalah ukuran kepuasan satuan kerja sebagai penerima layanan yang telah disediakan oleh penyelenggara layanan publik sesuai dengan layanan yang ditetapkan (Hernikawati, 2018)

Kepuasan merupakan perasaan bahagia atau sedih yang dirasakan oleh seseorang dari hasil jerih payah nya sendiri dalam karena mampu menghasilkan hasil yang luar biasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan pendekatan induktif (Rahmat, 2019). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh. Dengan teknik pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari Kemenkeu dan DJPB secara online dan data sekunder diperoleh dari wawancara langsung Satuan Kerja (satker) dan membagikan kuesioner kepada satuan kerja, dan juga melakukan wawancara dengan beberapa pegawai yang ada pada KPPN Meulaboh guna untuk mendapatkan informasi-informasi dan tanggapan terkait kinerja mekanisme IKPA terhadap kepuasan dan kinerja pada pegawai KPPN Meulaboh. Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang tanggapan pelayanan yang ada pada KPPN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) agar diketahui kualitas pelaksanaan kinerja anggaran belanja Kementerian Negara/lembaga dari sisi kesesuaian pada perencanaan, efektivitas, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi (Mhs, 2020).

Pimpinan kantor bisa memantau secara periodik lewat OM-SPAN masing-masing satker pada menu monev anggaran pelaksanaan, nilai IKPA diterbitkan pada tahunan. Akan tetapi, kepala kantor juga dapat melihat perkembangan pada setiap saat kegiatan yang ada di kantornya.

Ruang Lingkup IKPA Tahun 2021

Dasar pelaksanaan IKPA tahun 2021 merupakan peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA. Ruang lingkup perdirjen mencakup tentang upaya dalam mengatur penilaian pelaksanaan kinerja anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA (Berita, 2021).

Beberapa penilaian dalam anggaran belanja K/L dengan menggunakan (OMSPAN). terdapat 4 aspek yaitu:

1. Kesesuaian adalah pelaksanaan anggaran dengan perencanaan dalam DIPA.
2. Kepatuhan adalah penilaian terhadap kepatuhan Satuan Kerja (satker) pada perundang-undangan bidang pelaksanaan anggaran.
3. Efektivitas adalah penilaian terhadap pencapaian keluaran dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran.
4. Efisiensi adalah penilaian terhadap ketepatan satuan kerja pada pembayaran atas beban DIPA

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Merupakan saling terbukanya informasi dari publik yang di selenggarakan pertahun oleh kondisi informasi pusat untuk mengetahui pelaksanaan saling terbukanya informasi publik (RI, 2021).

Manfaat monev antara lain, sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja, terwujud dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.
2. Pengendalian pengeluaran negara, berwujud dalam bentuk perumusan

kebijakan terkait dengan pola ideal Penyerapan Anggaran Dan Pengendalian Manajemen Kas Pemerintah.

3. Meningkatkan Efisiensi Anggaran Belanja.

Dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2021 terdapat 13 indikator diantaranya yaitu:

1. Indikator Revisi DIPA
Merupakan perubahan rincian anggaran yang pelaksanaannya berdasarkan APBN tahun anggaran 2021 dan telah di sahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran 2021. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Adapun bobot penilaiannya yaitu 5%.
2. Deviasi Halaman III DIPA
Tujuannya yaitu menambahkan akurasi kebutuhan dana dan menjaga likuiditas.
3. Pagu Minus
Adalah realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun (6 digit). Perhitungannya ini guna untuk menghitung jumlah nilai pagu minus terhadap pagu DIPA nya. Pagu minus memiliki bobot 5%. Cara untuk menghilangkan pagu minus adalah sebagai berikut :
 - Membuat persamaan data satuan kerja dengan SPAN.
 - Selalu memonitoring ketercukupan pagu.
 - Melakukan persamaan dengan Eselon 1 akan penyelesaian gaji.
4. Penyampaian Data Kontrak
Merupakan informasi tentang perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang atau jasa, pelaksana swakelola. Penyampaian ADK ke KPPN paling lama 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Bobot data kontrak sebesar 10%.
5. Pengelolaan UP/TUP

Persediaan UP yaitu pembayaran secara langsung dengan jumlah tertentu yang akan di berikan ke Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional harian satker atau yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin di lakukan melalui pembayaran langsung.

Persediaan TUP adalah pembayaran uang secara langsung yang diberikan ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah di tetapkan. Bobot pengelolaan UP/TUP sebesar 8%.

6. Penyampaian LPJ Bendahara
Merupakan yang melakukan penerimaan atau pengeluaran pada uang dan surat berharga untuk pertanggungjawaban. Bobot penilaiannya 5%.
7. Dispensasi Penyampaian SPM
Adalah pengajuan surat perintah membayar (SPM) yang telah di tentukan pada ketentuan-ketentuan akhir tahun anggaran. Bobot penilaiannya 5%.
8. Penyerapan Anggaran
Indikator bermaksud untuk mengakselerasi belanja secara proposional. Penargetan penyerapan anggaran menggunakan sistem triwulan dan bersifat kumulatif. Bobot tahun ini yaitu 15%.
9. Penyelesaian Tagihan
Adalah mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan menggunakan sistem SPM LS Kontraktural. Pengajuan SPM LS paling telat 17 hari kerja setelah serah tanda tangan kontrak.
10. Indikator Capaian Rincian Output
Tahun 2021 ini, capaian output tahun ini adalah yang paling tinggi yaitu

sebesar 17% dan juga lebih tinggi dari penyerapan anggaran.

11. Indikator Retur SP2D

Merupakan penolakan atau pengembalian untuk memindahkan pembukuan atau mengirim pencairan APBN dari Bank Penerima Kepada Bank Pengirim. Bobot penilaian untuk indikator retur SP2D sebesar 5%.

12. Indikator Pengembalian atau Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)

Merupakan surat perintah membayar (SPM) yang kembali pada saat proses konversi di FO KPPN berdasarkan data pada PMRT atau kesalahan formal dan penolakan saat validasi tagihan oleh MO KPPN.

13. Indikator Perencanaan Kas (Renkas)

Merupakan penggabungan RPD harian, rencana penerimaannya, dan proyeksi keluaran atau pemasukkan unit eselon 1 kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan APBN yang mengacu dalam perencanaan kas pemerintah pusat. Bobotnya 5%.

Hasil survey IKPA pada satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh

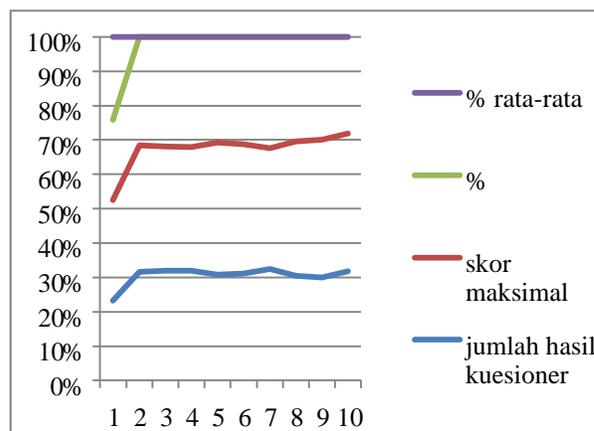
Artikel ini dibuat dengan bantuan dari satuan kerja (satker) yang ada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh (KPPN). Populasi pada penelitian ini adalah satuan kerja yang menjalin kerja sama dengan KPPN Meulaboh yaitu 4 kabupaten wilayah aceh, di antaranya Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Seumelue.

Semua satker merasa puas dengan pelayanan yang ada di KPPN karena menurut mereka pelayanan yang ada di kantor ini sangat lah baik dari segi apapun, mereka cepat paham dengan penjelasan yang di berikan oleh pegawai kantor KPPN Meulaboh.

Tujuan melakukan survey ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja dari pegawai KPPN Meulaboh dalam melayani seluruh satuan kerja yang terjalin kerjasama dengan

pihak KPPN, sekaligus untuk bahan perbaikan dalam segi pelayanan di masa mendatang serta sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan.

Gambar 1. indeks kepuasan satuan kerja terhadap pelayanan KPPN Meulaboh 2021



Gambar 1. penelitian di lakukan dari bulan Mei-Agustus 2021 dengan membagikan kuesioner kepada satuan kerja KPPN Meulaboh sebagai responden. Jumlah responden yang diambil sebanyak 20 orang dari total 96 satuan kerja (SATKER) yang terdiri dari KPA, Operator, Bendahara, Pengantar Surat Perintah Membayar (SPM), dan lain-lain. Kuesioner dibagikan dalam bentuk kertas. Indeks survey antara 1-5 dengan skala pernyataan : 1=Tidak Puas, 2=Kurang Puas, 3=Cukup Puas, 4=Puas, 5=Sangat Puas.

Hasil surveynya KPPN Meulaboh mendapatkan skor 83%, yang menunjukkan bahwa pelayanan yang terjadi di KPPN Meulaboh membuat satuan kerja (satker) pada saat ini merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan saat ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai IKPA adalah indikator yang ditetapkan Kemenkeu untuk mengukur Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja

Kementerian/Lembaga. Aspek yang menjadi pengukuran IKPA yaitu kesesuaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, efektifitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran memiliki hubungan dan pengaruh terhadap optimalisasi kinerja satuan kerja. Satuan Kerja (satker) sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak KPPN Meulaboh.

Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyajikan saran yang harus dilakukan yaitu satker tidak terlambat dalam menyampaikan data kontrak, KPPN juga harus meminimalisir kesalahan dalam pembuatan spm. Dan juga pegawai KPPN harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua Satuan Kerja (satker) yang ada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Annatasya Meisa Putri dan Aldilla Iriandy. (2020). Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online). *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(11), 1558–1572. <http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/125/69> Berita. (2021). *Reformulasi Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*.
- [2] Danella, E. (2017). *Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Subseksi Verifikasi Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV*.
- [3] Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2020). *Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-4/PB/2020* (p. 24).
- [4] Halim, J., & Andreani, F. (2017). Analisis Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Broadway Barbershop Pt Bersama Lima Putera. *Jurnal Komunikasi*, 5(1), 1–8.
- [5] Hernikawati, D. (2018). Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Data Di Pjkkd Batan. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(1), 29. <https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220103>
- [6] Mhs, E. M. (2020). Analisis Perencanaan Strategi, Kualitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Efektifitas Pengendalian
- [7] Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran Dan Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja (Sebuah Literatur Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(1), 132–138. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i1.352>
- [8] Pustakawan, D., & Akbar, R. (2013). Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Studi Pada KPPN Yogyakarta). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 1, 0–11. Rahmat, P. S. (2019). *Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz> RI, S. J. K. P. (2021). *LAPORAN TRIWULAN II. 021*, 1–2.